

ABSTRAK

Suatu badan hukum jika mengalami kegagalan dalam mengelola keuangan yang diperoleh dari usaha yang dilakukan , mempunyai hutang kepada badan usaha Negara atau badan usaha lainnya yang menghimpun dana dari masyarakat serta tidak beriktikad baik atau kooperatif dalam menyelesaikan hutang-piutang yang telah jatuh waktu serta dalam hal lain yang menurut kejaksaan dalam kepentingan umum maka suatu badan hukum tersebut bisa diajukan permohonan pailit Banyak orang berlomba-lomba mendirikan partai politik dengan tujuan untuk mendapat kedudukan di pemerintahan. Partai politik digunakan sebagai batu loncatan bagi politik menuju kekuasaan sehingga ketentua kepailitan jika juga dilakukan oleh partai politik bisakah partai politik ini diajukan permohonan pailit.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative dengan menggunakan Pendekatan Undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Berdasarkan penelitian yang dilakukan partai politik yang merupakan suatu badan hukum jika melakukan syarat dan ketentuan pailit maka partai politik tersebut juga bisa dilakukan permohonan pailit, sehingga perlu adanya pengaturan secara khusus , mekanisme dan ketentuan tentang permohonan pailit terhadap partai politik.

Abstract

A legal entity if experiencing a failure to manage the finances obtained from the business undertaken, has a debt to the State enterprise or business another entity which collects funds from the community and not intended or cooperative in settling debts that have fallen time and in other things Which according to the prosecutor's office in the public interest of a legal entity can be filed a petition for bankruptcy Many people compete to forming political parties with the aim to get a position in government. Political parties are used as a stepping stone for politics to power so that the bankruptcy if it is also done by a political party can this political party filed a petition for bankruptcy.

This research uses normative legal research method using statute approach (statute approach) and conceptual approach (conceptual approach)

Based on research conducted by a political party which is a legal entity if conducting bankruptcy terms and conditions, the political party may also apply for bankruptcy, so there is a need for special arrangements, mechanisms and provisions concerning bankruptcy settlement of political parties.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	vi
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Permasalahan	8
1.3 Tujuan Penulisan.....	8
1.4 Kegunaan	8
1.4.1 Kegunaan teoritis.....	8
1.4.2 Kegunaan praktis	8
1.5 Keaslian.....	9
1.6 Metode Penelitian	11
1.6.1 Jenis penelitian	11
1.6.2 Metode pendekatan.....	12
1.6.3 Bahan hukum.....	13
1.6.4 Analisa bahan hukum	14
BAB II PARTAI POLITIK SEBAGAI BADAN HUKUM DI INDONESIA...	15
2.1 Partai politik sebagai badan hukum di Indonesia.....	15
2.1.1 Badan Hukum di Indonesia	18
2.2 Partai politik	21
2.2.1 Pengertian dan sejarah partai politik	21

2.2.2 Prinsip-prinsip Pengaturan Partai Politik	24
2.2.3 Sistem partai politik.....	26
2.3 Hukum kepaillitan di Indonesia	30
2.3.1 Pengertian kepaillitan	31
2.3.2 Prinsip-prinsip kepaillitan	33
BAB III KEDUDUKAN PARTAI POLITIK DAN KEPAILITAN SUATU BADAN HUKUM SERTA PARTAI POLITIK	
3.1. Pengaturan partai politik dalam sistem perundang – undangan Republik Indonesia	38
3.2. Kedudukan Partai Politik Sebagai Badan Hukum di Indonesia	49
BAB IV PENUTUP	
4.1 kesimpulan.....	58
4.2 Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	60
BIODATA PENULIS	